

## Memelihara Soft Power Sebagai Landasan Strategi Diplomasi

**Trido Saputro**

*Mantan diplomat Indonesia di Mesir*

**Abstract:** *This article examines how soft power run as diplomatic strategy. The writer takes Indonesia and Egypt as the object of the study. Indonesia used soft power strategy to face some accidents while the Arab Spring happened in Egypt, when some Indoensian students are arrested because they are alleged involved in a forbidden organization. This strategy came into effect without many problems. Meanwhile, Egypt after Gamal Abdel Nasser also tends to use soft power strategy to show their interest, internally and internationally.*

**Kata Kunci:** *Indonesia; Mesir; Diplomasi; Soft Power*

### Pendahuluan

Pada umumnya orang menganggap bahwa dunia diplomasi merupakan sesuatu yang selalu berkaitan dengan kepentingan politis antar Negara. Anggapan ini ada benarnya dan mungkin juga tidak sepenuhnya benar seperti itu karena diplomasi tidak hanya untuk kepentingan ke luar saja tetapi juga untuk kepentingan ke dalam. Kadang juga orang menilai betapa sulitnya peranan para diplomat yang mengemban tugas demi kepentingan negara-nya. Di sisi lain juga orang bertanya, apakah benar diplomasi adalah upaya atau cara untuk saling menipu atau membohongi pihak yang satu dengan pihak yang lain demi “kepentingan” tersebut? Dan bagaimana sebenarnya diplomasi itu dijalankan? Serta mengapa pula harus ada diplomasi?

Mari kita simak secara saksama apa itu yang dinamakan diplomasi. Sebagai seorang mantan diplomat yang pernah mengalami langsung di lapangan, yang melihat, merasakan, menggeluti, dan bergaul secara langsung dengan peristiwa di negara akreditasi, penulis kemudian menganalisis secara matang sampai dapat dijadikan sebagai produk diplomasi. Memang memerlukan suatu strategi khusus supaya produk diplomasi itu terhindar dari suatu kesalahan fatal yang berakibat dapat meruntuhkan suatu negara. Yang menjadi salah satu contoh nyata yang dialami penulis adalah selama tiga tahun sepuluh bulan bertugas sebagai seorang diplomat di Mesir, yaitu salah satu negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah dan Afrika. Apa sebenarnya yang terjadi pada negara tersebut pada akhir-akhir ini dan selama pemerintahan Mesir dipegang oleh Presiden Hosni Mubarak?

### Soft Power Indonesia terhadap Mesir: Studi Kasus pada Arab Spring

Mesir mengalami masa sulit di segala bidang akibat “Revolusi 25 Januari,” yaitu ketika pemerintahan Hosni Mubarak jatuh. Peristiwa demi peristiwa berlangsung cukup cepat dan sulit diduga. apabila kita lihat ke belakang, jatuhnya pemerintahan Presiden Hosni Mubarak adalah karena terakumulasinya kekecewaan rakyat Mesir terhadap pemimpinnya yang sangat mengekang kehidupan mereka. Selama ini mereka kurang diperhatikan, dan mereka menganggap presidennya hanya mementingkan kerjasama dengan pihak luar negeri khususnya negara-negara Eropa dan Amerika demi pencitraan di luar negeri dan demi kepentingan para pejabat pembantunya, kroni-kroninya dan keluarganya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu kemarahan rakyatnya yang hingga pada antiklimaksnya yaitu revolusi, walaupun kita menganggapnya dan menyebutnya sebagai reformasi pemerintahan.

Berkaitan dengan diplomasi, bahwa seorang pemimpin memang dituntut harus mempunyai strategi diplomasi ke dalam dan diplomasi ke luar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehancuran pemerintahan Presiden Hosni Mubarak, dapat dikatakan sebagai kegagalan diplomasi ke dalam. Dalam hal ini, banyak hal yang mungkin dilupakan oleh seorang pemimpin negara atau kurangnya respon pemimpin terhadap kehendak rakyatnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpinnya yang tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang dirasakan oleh rakyatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ muncullah permasalahan demi perma- salah yang pada awal mulanya hanya pada skala kecil, namun semakin lama semakin menumpuk menjadi skala besar dan semakin kronis yang sewaktu-waktu tanpa disadari dapat berubah menjadi bencana politik yang sulit untuk dibendung. Oleh sebab itu, di sini pentingnya diplomasi. Dan sebenarnya diplomasi merupakan senjata ampuh bagi perdamaian atau dapat dikatakan sebagai peredam konflik.

Kegagalan pemerintah Mesir dalam melakukan diplomasi ke dalam sangat berkaitan dengan sejarah pemerintah Mesir itu sendiri. Bagaimana pemerintahan Mesir memelihara “soft power” atau kekuatan perangkat lunaknya yang dimiliki Mesir selama ini, apakah berjalan secara berkeadilan atau bahkan sebaliknya. Hal yang dapat dicermati di dalam kehidupan masyarakat Mesir sebetulnya sangat banyak yang dapat dimanfaatkan, tetapi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya kurang dimanfaatkan secara maksimal sehingga terkesan salah urus.

Kekuatan politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan pariwisata sebagai kekuatan perangkat lunak atau “soft power” kurang sekali diberdayakan. Pemerintah Mesir lebih berkuat pada kekuatan militer yang digunakan untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri di bawah undang-undang daruratnya yang dikenal sebagai “Emergency Law” di bawah pengawasan ketat oleh perangkat pengamanan Negara yang bernama “State Security”. Hal inilah yang menjadi momok rakyat Mesir dimana hanya rasa takut saja yang dirasakan rakyat Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Semua institusi yang ada baik yang lokal maupun internasional selama berdomisili di Mesir akan berada di bawah pengawasan “State Security” tersebut, apalagi organisasi- organisasi yang berbau politik akan selalu diawasi secara lebih ketat lagi sehingga sangat membatasi ruang gerak mereka.

Betapa pemerintah Mesir membatasi ruang gerak masyarakatnya sendiri dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari karena setiap langkah mereka selalu diawasi oleh State Security yang setiap saat dapat melakukan penangkapan terhadap siapa pun yang dianggap membahayakan negara. Dalam melakukan pengawasan, State Security atau lebih dikenal SS oleh banyak kalangan selalu menempatkan agennya di mana-mana. Agen ini berasal dari orang-orang yang direkrut dari setiap keluarga yang mempunyai anak laki-laki yang harus memasuki wajib militer. Dapat dibayangkan betapa banyaknya agen di Mesir yang berasal dari seorang laki-laki dari setiap kepala keluarga (KK). Demikian pula apabila SS mencurigai seseorang kemudian menangkapnya, prosedur pertama yang dilakukan adalah melakukan pengurungan di sel bawah tanah dan melakukan interogasi dengan menggunakan alat stroom. Hal ini dilakukan biasanya untuk kasus-kasus yang berbau politik. Sementara itu, untuk kasus kriminal biasanya dibawa dengan mobil penjara, kemudian ditempatkan di penjara sekelas Polsek dan selalu dipindah-pindah dari Polsek yang satu ke Polsek yang lain dalam kurun waktu yang tidak tentu. Di luar penjara saja mereka merasa terpenjara, apalagi di dalam sel penjara mereka lebih tersiksa lagi.

Sebuah pengalaman menarik yang dapat diambil dari situasi tersebut di atas adalah ditangkapnya seorang mahasiswa Indonesia yang dicurigai oleh SS sebagai orang yang diduga

terlibat sebuah organisasi terlarang, yaitu Ikhwanul Muslimin (IM), di mana pada proses awalnya yaitu sebelum diinterogasi dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sel penjara bawah tanah, kemudian dari pihak rekan-rekannya yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Mesir yaitu Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) melakukan kunjungan untuk pembelaan terhadap mahasiswa yang ditangkap SS tersebut.

Para mahasiswa PPMI yang diantar oleh petugas SS di ruang tahanan sangat terperanjat melihat kondisi yang ada di ruang tahanan tersebut karena rekannya berada dalam satu sel berukuran 3 x 3 m persegi bersama dengan sekitar 30 orang dan rata-rata orang Mesir yang berbadan besar-besar dibandingkan dengan orang Indonesia, mereka juga hanya mengenakan celana dalam saja. Begitu pengapnya suasana di sel bawah tanah tersebut yang mengesankan begitu tersiksanya mereka padahal mereka belum diproses interogasi. Dapat dibayangkan sendiri bagaimana mereka menjalani proses interogasi, seperti yang penulis ceritakan di atas bahwa mereka akan mengalami siksaan fisik yaitu dengan menggunakan alat stroom. Namun dengan berbagai cara dan kecerdikan para mahasiswa Indonesia dalam upaya membebaskan rekannya tersebut, yang pada akhirnya pihak PPMI menyampaikan kepada aparat keamanan bahwa anak tersebut sedang mengalami gangguan jiwa, maka pada akhirnya mahasiswa tersebut dibebaskan dari sel bawah tanah oleh SS.

Beberapa tahun kemudian peristiwa serupa berulang kembali, yaitu pada suatu hari kami mendapat informasi dari PPMI bahwa terdapat empat orang mahasiswa Al Azhar asal Indonesia ditangkap oleh SS di tempat pemondokannya di sekitar pemukiman penduduk Nasr City, Kairo. Keempat mahasiswa tersebut diduga terlibat kelompok terlarang di Mesir yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Tempat pemondokan mereka digeledah, kemudian aparat SS menyita CPU komputer dan sebuah gambar tokoh pemimpin Hamas Palestina, yang ketika itu memang sedang hangat-hangatnya perang Gaza yang melibatkan perang antara Palestina melawan Israel. Alasan penyitaan gambar tokoh Hamas tersebut karena tokoh tersebut pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sementara pemerintah Mesir sangat antipati terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) karena pemerintah Mesir sudah menetapkan IM sebagai organisasi terlarang.

Singkat cerita, keempat mahasiswa Indonesia tersebut dibawa oleh aparat keamanan Mesir dan tidak diketahui mereka akan dibawa ke mana karena para aparat keamanan tersebut tidak menyebutkan asal kesatuan mereka. Kemudian pada siang harinya petugas dari KBRI atas perintah Duta Besar melakukan penelusuran ke setiap unsur keamanan di Mesir namun tidak menemukan titik terang sama sekali tentang keberadaan para mahasiswa yang ditahan. Demikian pula pada hari kedua, kami juga tidak memperoleh keterangan apapun, bahkan semua akses dari pihak aparat keamanan yang dikenal secara pribadi pun menonaktifkan selulernya, sehingga kami benar-benar kehilangan jejak.

Melihat kondisi tersebut akhirnya kami mendatangi lembaga Intelijen tertinggi di Mesir yang sangat ditakuti dan disegani di semua kalangan baik militer maupun sipil, dengan melaporkan kejadian tersebut di atas dengan sejujur-jujurnya kepada instansi tersebut, bahkan pihak KBRI menawarkan bantuan mencari target yang sebenarnya dan sanggup menyerahkan yang dianggap target kepada aparat keamanan Mesir apabila target tersebut benar-benar melakukan kesalahan dan dianggap membahayakan Mesir. Alasan ini dipergunakan semata-mata untuk melindungi WNI yang sedang dalam kesulitan yang kebetulan menyangkut masalah hukum negara setempat. Di samping itu, kami juga menyatakan dengan meyakinkan sesuai dengan hasil konfirmasi di tempat kejadian, bahwa aparat keamanan Mesir tersebut sebenarnya salah tangkap.

Pihak Intelijen tertinggi tersebut akhirnya menyambut dengan baik segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak KBRI dan pihaknya berjanji untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari pihak KBRI tersebut. Apa gerangan yang terjadi setelah kami memasukkan laporan kejadian tersebut? Tanpa disangka-sangka esok paginya sekitar pukul 05.00 waktu setempat kami mendapat laporan dari PPMI bahwa keempat mahasiswa Indonesia tersebut sudah dibebaskan oleh aparat keamanan sekitar pukul 03.00. Peristiwa ini memang sangat di luar dugaan karena cara pembebasannya pun agak unik, yaitu dilepaskan atau dibebaskan dengan cara didrop di suatu tempat di sekitar kawasan Nasr City yang letaknya tidak jauh dari pemukiman penduduk tempat mereka tinggal. Akhirnya dengan rasa syukur mereka dapat kembali ke pemondokannya walaupun keadaannya masih terlihat trauma atas penangkapan tersebut.

Pihak KBRI pun selanjutnya menggali keterangan dengan melakukan wa- wawancara terhadap keempat mahasiswa tersebut tentang bagaimana keempat mahasiswa tersebut sampai ditangkap aparat keamanan Mesir. Menurut keterangan mereka bahwa beberapa hari sebelum kejadian mereka keda- tangan tamu laki-laki Mesir yang dikenal oleh salah satu dari empat maha- siswa. Sebenarnya tamu tersebut adalah teman lama dari salah satu maha- siswa di tempat itu. Selanjutnya mereka berbincang-bincang biasa seperti percakapan sehari-hari di kampus. Waktu berselang lebih dari satu minggu, maka terjadilah semacam penggerebegan di tempat itu yang dilakukan aparat keamanan Mesir sekitar pukul 02.00 ketika para mahasiswa sedang tertidur lelap. Salah satu dari aparat keamanan menanyakan salah satu nama yang dianggap target, kemudian dijawab oleh salah satu mahasiswa bahwa target tersebut memang tinggal di tempat tersebut tetapi yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat dan diinformasikan bahwa yang bersangkutan sedang ke luar kota mengantar tamunya mengunjungi salah satu tempat wisata di Sinai. Atas jawaban tersebut para aparat keamanan merasa tidak puas dan kemudian mengobrak-abrik tempat pemondokan dan menyita beberapa barang seperti CPU computer dan sebuah gambar poster salah satu tokoh perjuangan Palestina. Hal ini dilakukan karena aparat keamanan akan mengambil dan meneliti isi dari CPU tersebut, sedangkan gambar poster tokoh Palestina tersebut adalah pernah menjadi anggota dari IM yang dari sejak lama sebagai kelompok terlarang di Mesir. Oleh sebab itu, atas dasar hal tersebut pihak keamanan Mesir merasa patut melakukan penangkapan terhadap siapa pun yang mendukung perjuangan kelompok IM. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya setelah mereka dibawa oleh aparat keamanan dan bagaimana pula nasib mereka ketika ditahan di markas keamanan Mesir. Ternyata sejak mereka digiring pun mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, antara lain yaitu diperlakukan secara kasar dengan dipukul, ditendang dan salah satu mahasiswa terkena pukulan popor senjata jenis AK-47 yang dibawa aparat keamanan, sampai dinaikkan ke dalam sebuah mobil tahanan yang berjeruji dan mereka masing-masing ditutup matanya dengan kain hitam dan dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui.

Setelah sampai di tempat tujuan, mereka hanya dapat menyaksikan adanya beberapa ruang tahanan, kemudian mereka ditempatkan di salah satu ruang tahanan, kemudian diadakan proses interogasi dengan cara memanggil satu persatu dari mereka ke satu ruangan khusus. Seperti biasanya seperti yang penulis katakan di atas bahwa proses interogasi yang aparat keamanan lakukan adalah dengan cara menggunakan alat stroom. Demikianlah yang dialami oleh para mahasiswa sehingga sangat wajar kalau mereka meng- alami trauma karena selama salah satu di antara mereka sedang diproses interogasi, mereka yang menunggu giliran diinterogasi mendengar dengan jelas teriakan dan rintihan kawan mereka yang sedang menjalani interogasi

sehingga secara psikologis sangat mengganggu kejiwaan mereka dan rasa takut yang luar biasa pada diri mereka selama menanti giliran untuk diinterogasi.

Bagaimana pun ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua, betapa kita tidak bisa meremehkan begitu saja negara lain di mana kita sedang bertugas atau pun sedang melakukan studi dan lain-lain kepentingan untuk selalu menaati hukum yang berlaku di negara tersebut atau negara akreditasi. Sesungguhnya pula bahwa hubungan negara yang satu dengan lainnya dalam kaitan dengan urusan diplomasi, ada semacam istilah yang berlaku imbal balik yang disebut sebagai azas reciprocal. Azas ini diberlakukan untuk kesamaan perlakuan antar diplomat dari segi-segi kepentingan sarana dan prasarana maupun personilnya, sebagai contoh apabila negara kita mempunyai hubungan diplomatik dengan suatu negara lain, masing-masing negara tentunya menempatkan perwakilannya di antara negara tersebut dengan perlakuan yang seimbang, baik penempatan personilnya maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pelajaran selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada semua Warga Negara Indonesia (WNI) di negara akreditasi, untuk tidak menganggap remeh hukum yang berlaku di negara yang kita tempati dan tidak menganggap tempat itu sebagai kampung halamannya sendiri sehingga melupakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi setiap WNI hendaknya mempelajari terlebih dahulu hukum yang berlaku di negara yang akan kita singgahi untuk beberapa waktu lamanya serta karakteristik negara tersebut, agar kita dapat dengan mudah mengantisipasi segala sesuatu yang akan kita hadapi. Termasuk pula di dalamnya tentang etika pergaulan di semua tempat, baik resmi maupun tidak resmi. Hal-hal inilah yang sekiranya kita perlu perhatikan karena hal ini pulalah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang.

Kembali kepada permasalahan hubungan kediplomatikan berkaitan dengan peran seorang diplomat yang tugasnya lebih banyak mempengaruhi dan menghalang orang-orang setempat, agar orang-orang tersebut dapat membantu dalam segala hal. Demikian pula para counter part yang terkait dengan tugas-tugas kita juga harus dimanfaatkan, salah satunya adalah makan siang atau makan malam bersama atau menyalurkan hobby yang sama agar dari masing-masing pendekatannya dapat diperoleh nilai tambah di dalam pergaulan antar diplomat yang tentunya sangat berguna dalam hal sharing informasi dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kepentingan negara masing-masing.

Sedangkan hal-hal lain yang perlu dan harus dikembangkan adalah meningkatkan hubungan diplomatik itu sendiri sesuai dengan misi yang diemban oleh para diplomat di mana pun berada. Atas nama negara, para diplomat harus dapat menciptakan sesuatu agar citra negara kita tetap berkibar dan lebih dihargai oleh negara lain. Sebagai suatu pengalaman yang sangat menarik di Negara Mesir pada pertengahan tahun 2010 yang lalu, KBRI Kairo menyelenggarakan peringatan 63 tahun hubungan diplomatik RI – Mesir. Kelihatannya memang agak janggal karena menurut kebiasaan bahwa peringatan-peringatan yang bersejarah itu dilakukan ketika usia 50 tahun atau 60 tahun yang sifatnya jatuh pada angka-angka genap. Namun sebagai seorang diplomat, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Kairo yang ketika itu dijabat oleh Abdurrahman Mohammad Fachir, seorang diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri, tidak menyia-nyiaakan kesempatan yang ada dan membuat ide yang sangat unik, semata-mata demi lebih meningkatkan hubungan emosional antara Indonesia dengan Mesir. Maka, diselenggarakanlah Peringatan 63 Tahun Hubungan Diplomatik RI – Mesir.

Peringatan ini dinilai memang sangat luar biasa dan tidak main-main. semua dipersiapkan dengan matang demi suksesnya acara tersebut. Panitia yang sudah dibentuk bekerja keras



dengan tugas masing-masing antara lain menyiapkan pembuatan buku tentang hubungan RI – Mesir, yang sum- berna dikumpulkan dari fakta-fakta sejarah yang sangat sulit untuk dicari dokumennya, yang tidak saja diambil dari arsip nasional di Indonesia, melainkan juga sumber-sumber kearsipan di Mesir dan beberapa arsip dari mass media setempat. Fakta-fakta sejarah itu pun dikumpulkan sejak periode presiden pertama Indonesia Soekarno dan presiden Mesir Gamal Abdl Naser hingga sekarang. Pengumpulan data ini berlangsung kira-kira satu tahun lamanya. Namun berkat ketekunan para panitia, maka tercipta- lah sebuah buku berjudul “Jauh di Mata Dekat di Hati”. Penamaan judul buku ini tercipta dari hasil konsultasi kepada Bapak Hasan Wirayudha, Menteri Luar Negeri saat itu, kemudian beliau menyarankan buku tersebut diberi judul seperti tersebut, ketika beliau berkunjung ke Kairo, Mesir.

Acara peringatan persahabatan Indonesia – Mesir pun akhirnya digelar dengan menampilkan beberapa pertunjukan yang banyak melibatkan kolaborasi kesenian Indonesia dan Mesir yang disuguhkan secara profesio- nal sehingga dapat membangkitkan emosional para undangan yang mayo- ritas orang Mesir. Para undangan juga dihadirkan dari para pejabat peme- rintah Mesir, tokoh-tokoh politik senior di era Presiden pertama Mesir, keluarga-keluarga mantan presiden Mesir, para agamawan Mesir, para pengusaha Mesir, serta para pelajar dan mahasiswa Mesir. Di dalam acara itu juga ditampilkan slide- slide hubungan Indonesia – Mesir. Singkatnya mereka merasa puas atas penyelenggaraan tersebut karena mereka juga sebagai orang Mesir tidak begitu mengikuti perkembangan hubungan persahabatan ini, apalagi memonitor secara terus menerus sehingga pada akhir acara banyak orang Mesir yang tertarik minatnya untuk belajar bahasa Indonesia dan ingin berkunjung ke Indonesia, bahkan ingin belajar di Indonesia.

Bergulirnya minat dari beberapa tamu yang hadir tidak lain adalah upaya menginovasi peningkatan hubungan diplomatik yang dirancang oleh perwakilan Indonesia di Kairo. Demikian pula paska pertunjukan peringatan 63 tahun hubungan Indonesia – Mesir, KBRI menjadi sangat disibukkan dengan kerjasama-kerjasama baru, khususnya di bidang sosial budaya, pendidikan dan perdagangan. Dengan demikian semakin jelas terlihat hasil dari bentuk- bentuk diplomasi yang berhasil diciptakan oleh KBRI Kairo. Demikian pula pelayanan masyarakat terutama di bidang kekonsuleran yang menangani masalah pelayanan visa, juga ikut andil di dalam mempererat hubungan RI – Mesir tersebut yaitu dengan menciptakan suatu sistem pelayanan cepat pelayanan visa dengan nama “One Day Service”. Sistem ini disambut baik dan sangat antusias masyarakat Mesir dengan makin mening- katnya kunjungan wisata dari Mesir ke Indonesia.

Bidang-bidang kerjasama seperti tersebut di atas menyiratkan semakin meningkat sejak tahun 2011 yang lalu, seperti kerjasama di bidang sosial budaya terjadi pertukaran kunjungan misi kesenian kedua negara, kemudian di bidang pendidikan diadakan program pertukaran mahasiswa antar mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Mesir. Selain itu masih di bidang pendidikan, bahwa KBRI Kairo juga mengadakan kursus bahasa Indonesia bagi orang asing khususnya untuk orang Mesir secara cuma-cuma dan bagi mereka yang mengikuti kursus tersebut apabila prestasinya sangat memuaskan akan diberikan beasiswa untuk mengikuti kuliah di Indonesia, khusus- nya di perguruan tinggi yang membuka kerjasama tersebut, seperti Univer- sitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret, Solo.

Tidak kalah ramainya di bidang perdagangan, di mana banyak pengusaha Mesir yang berminat membeli beberapa jenis komoditi ekspor dari Indo- nesia, seperti ban mobil, accu mobil, CPO, sabun mandi, sabun cuci, mie instant, furniture dan peralatan yang terbuat dari

plastik, serta masih banyak lagi jenis yang masih belum terinfokan dan masih dalam taraf negosiasi.

Itulah kira-kira dampak suatu upaya diplomasi yang dipersiapkan secara matang dan berstrategi, sehingga KBRI mendapatkan nilai tambah sebagai penggalang pemasukan devisa negara melalui komoditi-komoditi tersebut. Dengan demikian pekerjaan para diplomat menjadi mudah apabila sistem penggalangannya mencapai sasaran dengan benar. Oleh sebab itu, keberhasilan ini harus tetap terjaga dan terpelihara agar pendapatan Negara kita semakin besar. Dampak dari kegiatan ini semua menyiratkan bahwa pada intinya Mesir sudah jatuh hati pada Indonesia.

### **Strategi Diplomasi Mesir di dalam dan di Luar Negeri**

Kembali kepada permasalahan dalam negeri Mesir yang rakyatnya masih merasa terbelenggu oleh undang-undang darurat atau Emergency Law, membuat rakyat Mesir menginginkan adanya reformasi. Keinginan adanya reformasi ini berjalan agak lamban, namun demikian keinginan-keinginan itu tetap digulirkan dengan wacana-wacana proses demokratisasi melalui mass media setempat untuk memberikan pelajaran berharga kepada seluruh rakyat Mesir. Wacana-wacana tersebut rupanya semakin berkembang dari waktu ke waktu, kemudian meningkat menjadi pembicaraan di ranah public dengan semakin maraknya dialog-dialog umum, diskusi-diskusi dan semi-nar-seminar yang melibatkan berbagai unsure sehingga wacana seputar keinginan adanya reformasi semakin disambut positif oleh rakyat Mesir. Berbeda halnya dengan sikap pemerintah Mesir melihat adanya gejala-gejala dari aktivitas masyarakat saat ini yang menginginkan adanya reformasi, justru pihak pemerintah semakin menegatkan peraturan-peraturan dan mempertahankan undang-undang darurat. Pihak pemerintah mulai memonitor siapa gerakan di balik semua ini, namun demikian pemerintah Mesir mulai mengadakan tindakan antisipatif terhadap kelompok yang dianggap sangat potensial mengganggu dan mengusik keberadaan undang-undang darurat Mesir. Kelompok tersebut tidak lain adalah Ikhwanul Muslimin yang saat itu menjadi kelompok oposisi terbesar di Mesir.

Dalam upaya sedikit meredam bergulirnya wacana-wacana reformasi, pemerintah Mesir mulai melakukan reformasi politik yang dilakukan Presiden Mubarak melalui amandemen konstitusi (2005 dan 2007) telah membawa perubahan sistem pemilu presiden dari referendum menjadi pilpres multi kandidat, namun pihak oposisi justru terus melancarkan kritikan terhadap pemerintah, khususnya kepada National Democratic Party (NDP) yang merepresentasikan mayoritas wakil rakyat di perlemen (Majlis Sha'ab) atas berbagai kebijakan antara lain adalah larangan pembentukan dan aktivitas partai-partai berbasis agama, ditetapkannya prasyarat kandidat independen dalam pemilihan presiden (pilpres) harus mendapatkan dukungan 250 anggota yang dipilih dalam Majelis Rakyat, Dewan Syura dan Dewan local (yang didominasi NDP), diadopsinya sistem proporsional partai dalam pileg yang mempertegas pengucilan sejumlah kekuatan politik seperti IM, dikurangnya pengawasan judicial terhadap pemilu dengan membentuk komisi pengawasan khusus yang terdiri dari dua hakim dan mantan pejabat pemerintah, kemudian tetap memberlakukannya UU keadaan darurat (Emergency Law), serta pemberian wewenang tanpa batas kepada presiden.

Dalam konteks ini, mengemukanya wacana skenario pewarisan kekuasaan sejak penunjukkan Gamal Mubarak (putra Presiden Hosni Mubarak) sebagai ketua Komite Kebijakan NDP hingga dua tahun terakhir (2009-2010) semakin mempertajam perbedaan

visi antara pemerintah dengan oposisi mengenai kegagasan proses suksesi kepemimpinan pasca Mubarak. Di sisi lain, perbedaan sikap antar partai dan kelompok oposisi dalam berbagai isu politik turut andil dalam terciptanya kondisi kekeruhan pentas politik Mesir yang selalu merugikan pihak oposisi alih-alih mencapai kemajuan dalam mendorong proses demokratisasi di Mesir.

Menjelang digelarnya pemilu legislative di Mesir terlihat suasana yang kurang bergairah, sebab pemerintah Mesir melalui aparat keamanannya justru semakin arogan. Banyak tokoh oposisi yang ditangkap tanpa sebab dan tidak tahu kesalahannya. IM yang sudah merubah paradigmanya menjadi paradigm baru, yaitu terlibat dalam aktivitas parlemen, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam system politik yang berlaku di Mesir, namun pemerintah Mesir tidak menghentikan kebijakan represif dan restriksi yang semakin menegaskan upaya pengucilan pemerintah terhadap IM dari kehidupan politik. Aparat keamanan senantiasa melakukan penahanan dengan berbagai dalih terhadap para anggota dan para tokoh IM, sejak Deklarasi Partisipasi IM dalam pileg 2010.

Dalam kasus ini terlihat semakin jauh jurang pemisah antara IM dan partai- partai lain yang mewakili masyarakat Mesir dengan pihak pemerintah, sehingga ketika pemilu Mesir digelar pun (13/11/2010) tingkat turnout nya sangat rendah, yaitu hanya mencapai 5% - 15% saja. Dalam hal ini keme- nangan hanya diraih oleh NDP saja dengan perolehan 87% kursi parlemen. Keberhasilan ini justru disambut dengan pemboikotan partai oposisi, khususnya IM dan partai Wafd sehingga membuat pemerintah terancam krisis kredibilitas dan legitimasi baik dari parpol maupun masyarakat luas khususnya karena melihat dari turnout tersebut.

Gelombang pro reformasi menjadi lebih menyebar ke seluruh komponen- komponen masyarakat yang ada di Mesir dan semakin terasa bahwa per- alihan kekuasaan yang dipastikan akan segera mewarnai kehidupan politik Mesir, menyusul kepergian presiden Mubarak ke Jerman untuk menjalani operasi kandung empedu telah menjadi indikasi awal proses peralihan tersebut. Diprediksi kuat bahwa presiden Mubarak tidak akan sanggup lagi menjalankan pemerintahan dalam satu atau dua tahun setelah menjalani operasi.

Tekanan kekuatan oposisi pro reformasi terus giat menyuarakan aman- demen konstitusi dan pencabutan UU Darurat dengan berbagai kendala yang menantang skenario reformasi, baik kendala konstitusi maupun mobi- litas akar rumput untuk mendukung agenda reformasi ketika menghadapi jalan buntu. Kebijakan pemerintah Mesir juga tetap mengadopsi kebijakan membatasi partisipasi IM dalam kehidupan politik Mesir. Namun demikian kelompok pro reformasi yang dimotori oleh Mohammed El Baradei (mantan Sekjen IAEA) yang kembali ke Mesir, bersama IM dan kelompok oposisi lainnya bergabung dalam wadah National Association for Change (NAC) terus menerus menggelindingkan upaya reformasi dan berhasil menciptakan opini public tentang perubahan dan menarik elemen dan anggota baru dalam upaya menekan pemerintah untuk melakukan perubahan. Kampanye pengumpulan tanda tangan sebagai dukungan terhadap tujuh tuntutan reformasi, antara lain adalah Penghapusan UU Darurat, Pemberdayaan Lembaga Peradilan dalam mengawasi seuruh prosesi pemilu, dilibatkannya organisasi sipil di tingkat local maupun internasional dalam pemantauan pemilu, serta dibukanya kesempatan yang sama untuk semua kandidat dalam berkampanye di media publik. Upaya ini ternyata telah menarik semua kalangan dan menunjukkan interaksi nyata di ruang publik Mesir.



Meluasnya tuntutan rakyat terhadap reformasi sosial dan politik seiring dengan berhasilnya Revolusi Tunisia dalam mengakhiri kekuasaan presiden Zine El Abidine Ben Ali telah memicu semangat reformasi di Mesir. Kelompok oposisi segera menyeru pemerintah pada 20/01/2011 untuk melakukan reformasi demi mengantisipasi terulangnya Revolusi Tunisia, namun tidak segera mendapat respon serius dari pemerintah hingga bergulirnya Revolusi 25 Januari.

Sesungguhnya menjelang Revolusi 25 Januari, Mesir sempat menyaksikan gejala sektarianisme dengan terjadinya aksi pengeboman gereja St. Mark dan St. Peter di Prop. Alexandria, Mesir pada malam Tahun Baru 2011 yang memakan banyak korban dan menimbulkan eksekusi dan gesekan antara warga Muslim dengan Koptik. Bagi banyak pengamat, aksi-aksi sektarian merajalela di Mesir setelah pemerintah gagal melakukan reformasi politik dan merupakan suatu bentuk rekayasa untuk mengadu domba antar umat beragama sebagai pengalihan isu sentral yang sedang berkembang. Namun pengalihan perhatian ini pun ternyata tidak berpengaruh sama sekali bagi seluruh kalangan di Mesir, rakyat Mesir justru lebih terilhami oleh gerakan Revolusi rakyat Tunisia yang berhasil menumbangkan rezim Ben Ali setelah memerintah selama 20 tahun. Gelombang demonstrasi “Yaoum Al Ghadab” atau hari kemarahan digelar di Kairo dan beberapa kota besar di Mesir berlangsung pada Jum’at 25 Januari 2011. Dan oleh berbagai pihak, demo hari kemarahan ini telah melampaui semua prediksi, setelah sebelumnya banyak pihak meregukan partisipasi warga Mesir karena sejumlah aksi protes sebelumnya hanya dicetuskan lewat Facebook, namun aktivitas riil di jalanan sangat berbeda dengan aktivitas dunia maya. Ternyata insiden 25 Januari telah membuktikan sebuah upaya serius dan menunjukkan keinginan warga Mesir yang sangat kuat untuk melakukan reformasi politik hingga berhasil menorehkan sejarahnya dalam mengakhiri kekuasaan Presiden Hosni Mubarak setelah 30 tahun memerintah.

Setelah memakan ratusan korban jiwa menyusul digunakannya pendekatan represif aparat keamanan, pendekatan persuasif Presiden Hosni Mubarak tidak mampu meredakan gelombang unjuk rasa yang semakin memuncak hari demi hari. Akhirnya setelah 18 hari digelarnya Hari Kemarahan, Presiden Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata (Supreme Council of The Armed Force/SCAF) yang diketuai oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Marsekal Mohammad Hussein Tantawy.

Begitulah sebuah gambaran nyata tentang bagaimana pun atau sekuat apa pun orang bahkan Negara kalau melupakan “soft power” nya akan segera menanggung risiko kerugian yang tak ternilai. Apalagi ini baru melakukan pemeliharaan “soft power” di tingkat urusan dalam saja, yang nota bene masih lebih banyak orang lain yang dapat membantu untuk kepentingan urusan dalam dibandingkan dengan urusan luar yang lebih sulit penanganannya karena lebih mempertaruhkan kedaulatan Negara. Kemudian bagaimanakah selanjutnya Negara Mesir dalam melakukan hal strategis dalam memelihara “soft power” nya untuk urusan luar negerinya. Mari kita lihat bersama tentang salah satu contoh hal strategis yang sempat dilupakan oleh Negara Mesir di bawah ini.

Hubungan luar negeri Mesir sebenarnya sangat potensial apabila dilihat dari perkembangan sejarahnya. Mesir telah menjadi barometer segala aktivitas kehidupan di dunia Arab, Afrika dan Timur Tengah. Bila kehidupan politik di Mesir mengalami chaos, hal ini akan segera memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial, politik dan keamanan di kawasan. Mesir memiliki pengaruh terbesar di kawasan Timur Tengah dengan berbagai elemen

“soft power” yang dimilikinya. Mesir antara lain memiliki asset peradaban, posisi dan bobot demografis di jantung bangsa Arab, kemudian kebesaran Al Azhar sebagai sebuah institute keagamaan terke- muka di dunia Islam, di samping memiliki eksistensi di jantung benua Afrika, memiliki tenaga ahli dan penelitian mutakhir di kawasan Arab, kepemimpinan intelektual dan budaya, serta eksperimen kebebasan tertua di dunia Arab.

Pengaruh Mesir semakin mengkristal di dunia Arab pada dekade 50-an ketika melecut kebijakan luar negeri independen yang memperjuangkan bangsa Arab dan kebijakan dalam negeri yang berawal dari rencana pem- bangunan ambisius dan membela kesetaraan sosial yang merupakan simbol revolusi Mesir 1952. Namun demikian, selama dekade terakhir kepe- mimpinan Mubarak, asset ini terkikis oleh sejumlah faktor yang berhu- bungan dengan struktur kediktatoran di bawah rezim pemerintah yang tidak ingin menyerahkan sentralitas pengelolaan proses politik, dan tidak menya- dari problematika besar bahwa menyerang elemen-elemen “soft power” internal Mesir untuk memaksakan kontrolnya akan mengikis peluang “soft power” di luar negeri. Akhirnya, peran Mesir di Timur Tengah menghadapi persaingan dengan sejumlah Negara termasuk Turki, Iran, dan bahkan Negara kecil seperti Qatar. Kemudian peran Mesir pun dalam memediasi konflik antara Fatah dan Hamas, serta upaya menstabilkan Sudan dan mendorong perdamaian Arab-Israel telah tertantang dan berhadapan dengan negara-negara lain di kawasan.

Di sisi lain, peran luar negeri Mesir di kawasan telah menurun setelah me- nguatnya persepsi yang berkembang bahwa Mesir sibuk dengan urusan dalam negeri dan Mesir berada dalam momen ketidakpastian di dalam negeri termasuk belum adanya kemauan serius untuk peralihan kekuasaan secara damai dan hal ini berarti tidak dapat mengagendakan untuk melaku- kan proaktif dalam suatu Negara besar.

Dalam fase ini, Mesir tidak memiliki visi yang dapat dikomunikasikan ke seluruh kawasan ini. Tidak cukup bagi Mesir hanya mengurus perdamaian, ia harus menambahkan agenda moderasi dalam negeri, hak asasi manusia dan demokrasi. Hal ini tidak mudah untuk menggulirkan perdamaian di kawasan ini, tetapi bukan suatu hal yang meyakinkan bagi Mesir untuk mendukung perdamaian, sementara melecehkan aktivis oposisi di dalam negeri. Pada dasarnya, Mesir masih dapat menggunakan beberapa instru- men budaya, sosial kemasyarakatan untuk mendukung kekuatan-kekuatan lunaknya di kawasan.

Ada hal menarik dan unik untuk mendapat perhatian khusus yang berkaitan dengan hubungan luar negeri Mesir dengan Negara-negara di hulu sungai Nil atau yang terkenal disebut sebagai Nile Basin Issue (isu Nile Basin). Sebetulnya pengaruh Mesir di negara-negara lembah sungai Nil telah terbangun selama berabad-abad khususnya dalam dua abad terakhir, baik melalui kerjasama ekonomi dan politik langsung di abad ke XIX yang bertolak dari visi yang memandang Sudan dan Afrika sebuah daerah vital bagi Mesir. Namun hal ini semakin terkristal pada pasca era Republik, ketika Presiden Gamal Abdel Nasser mengadopsi filosofi yang menganggap Afrika sebagai salah satu daerah sentral Mesir, dan mengembangkan secara kuat hubungan diplomatik dan eksistensinya di Afrika. Nasser mencanangkan programnya melalui sejumlah kementerian dan diplomasi Mesir, serta ekspor dan impor di Sub Sahara Afrika. Di samping itu Mesir mengambil kebijakan menerima mahasiswa Afrika di perguruan-perguruan tinggi di Mesir dengan biaya yang ringan, dan memberi dukungan terhadap lembaga- lembaga keilmuan seperti Lembaga Keimuan Afrika, dan memotivasi studi- studi keAfrikaan melalui dukungan terhadap Institute Study Afrika. Namun pasca Nasser, kebijakan Presiden Anwar Sadat berubah dan mengarah pada upaya menjalin persahabatan dengan AS dan Barat, serta berdamai dengan Israel. Akibatnya, negara-negara Arab memutuskan hubungannya dengan

Mesir, Negara-negara Islam menjauh, dan negara-negara Afrika tidak mengacuhkan Mesir dan sebaliknya. Pada dekade 70-an, Mesir menutup diri dengan anggapan membangun perekonomian bebas, dan eksperimen demokrasi yang pada akhir era Sadat berujung pada akhir yang menyakitkan yang berupa penangkapan seluruh spectrum oposisi.

Setelah itu, Hosni Mubarak mengambil kebijakan yang berbeda yaitu mengadopsi prinsip untuk “tidak melewati tapal batas Mesir” dan tidak memberi peluang untuk konflik apa pun hasilnya positif atau negative. Akhirnya, hubungan Mesir dengan Negara-negara Afrika hanya simbolis dan seremonial, dan kekosongan kepemimpinan benua Hitam segera diisi oleh kekuatan-kekuatan lain di benua Afrika.

Sebelumnya, Mesir memiliki asset dalam mendukung kekuatan pembebasan dalam era kemerdekaan di banyak Negara Afrika, namun asset telah disia-siakan, dan upaya yang dilakukan oleh Mesir dalam mengutuk upaya negara-negara hulu sungai Nil sebaiknya diarahkan pada meninjau ulang penyebab kegagalan diplomasi Mesir selama beberapa dekade dalam membangun warisan historis kuat yang dilakukan oleh peran Mesir di Afrika, dan memberikan perhatian mendalam dan sumber daya yang lebih besar dalam memperbaiki apa yang telah terjadi.

Pada fase ini, titik kulminasi terpuruknya hubungan Mesir – Afrika terlihat jelas dalam pertemuan Sharm El-Syeikh, Mesir pada 15/04/2010 yang berakhir dengan walk out-nya delegasi 7 (tujuh) Negara Hulu sungai Nil. Dalam perkembangannya, lima Negara Hulu Nil menandatangani secara sepihak The Nile Basin Cooperation Framework Agreement (NBCFA) pada 14/05/2010 di Entebbe, Uganda. Basin Nil adalah sumber air bersama dari sungai Nil antara 10 negara, yaitu Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Eritrea, Sudan dan Mesir.

Dalam konteks ini, sejumlah analis telah menyatakan bahwa pengaruh Mesir di Afrika pupus. Namun demikian, mantan direktur Al-Nasr Co., Mohamed Ghanem (pebisnis ekspor-impor Mesir) tetap meyakini bahwa waktu tidak terlalu terlambat untuk memperbaiki, jika keinginan politik pemerintahan Mesir benar terwujud, di samping strategi serta orientasi politik Mesir telah mengalami revisi.

Selain itu, berbagai perkembangan di Negara Basins Nil pasca revolusi Januari membentuk sebuah tantangan bagi pemerintahan transisi di Mesir. Penandatanganan “Nile Basin Cooperation Framework Agreement” (NBCFA) oleh 5 di antara 10 negara Lembah Nil telah menciptakan sebuah realitas dan tantangan baru terhadap keamanan nasional Mesir dengan implikasi hilangnya hak privilese Mesir atas air sungai Nil termasuk hak veto terhadap setiap pembangunan proyek di aliran sungai Nil di luar wilayah Mesir.

Realitas tersebut dianggap sebagai faktor pertama yang akan dibayar oleh Mesir akibat kebijakan penanganan rezim sebelumnya terhadap isu paling kritis yang dihadapi oleh Keamanan Nasional Mesir yang telah mengikis wibawa dan peran Mesir di Afrika dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun Burundi disebut-sebut akan mendukung inisiatif Presiden Mubarak untuk mengakhiri krisis Nil dan Burundi tidak akan mengambil sikap apa pun yang merugikan Mesir, serta mengharapkan untuk dapat mengekspresikannya melalui dialog antar negara-negara Basins Nil untuk menyelesaikan krisis distribusi ulang air sungai Nil untuk kemaslahatan bersama, dan Burundi secara resmi menandatangani NBCFA pada 28/02/2011 sehingga akan memudahkan bagi penetapan kesepakatan baru tersebut. Setelah penandatanganan itu, kesepakatan distribusi ulang air sungai Nil berpotensi besar terealisasi, berdasarkan UU Internasional yang berlaku bahwa

minimal 6 dari Negara Nile Basin harus menandatangani sebuah kesepakatan sebelum ditetapkan.

Di sisi lain, perkembangan hubungan Sudan Utara – Sudan Selatan pasca referendum menunjukkan terjadinya pemisahan Utara – Selatan. Hal ini menjadi tantangan baru, meski Kamal Ali Muhammad, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Sudan mengatakan bahwa pemisahan tersebut tidak membatasi kesepakatan kuota air dengan jatah air di antara keduanya, dan menekankan bahwa kuota air kedua wilayah itu akan dibagi rata sebagai- mana letak geografis yang sama-sama dilalui aliran sungai Nil Putih.

Dalam upaya antisipasi, pemerintah Mesir menandatangani MoU bersama pemerintah Sudan Selatan pada 30/03/2011 dalam bidang sumber daya air dan proyek pembangunan di Sudan Selatan.

Ada tantangan lain yang lebih riil terlihat dalam kebijakan pemerintahan Addis Ababa yang telah memulai persiapan pembangunan bendungan terbesar di Nil Biru di kawasan perbatasan Ethiopia-Sudan, sambil menegaskan bahwa Ethiopia akan membangun PLTA yang mampu memasok 6000 megawatt (MW) energi listrik. Bendungan yang akan dibangun tersebut diperkirakan akan menyerap lebih dari 17 milyar meter kubik air per tahun. Disebutkan bahwa dampak negative bendungan Ethiopia yang dapat menampung 6 milyar kubik air adalah terhambatnya saluran air ke Mesir, serta berdampak negative terhadap aspek lingkungan khususnya sekitar aliran sungai Nil. Bendungan tersebut juga akan mengancam areal pertanian seluas 1 juta feddan di lembah Delta Nil. Pembangunan bendungan juga akan mengakibatkan susutnya volume air danau Nasr dari 120 milyar meter kubik menjadi 75 meter kubik dengan berkurangnya 20% energi listrik yang dihasilkan oleh bendungan Aswan di Mesir.

Dalam situasi yang keruh tersebut Melez Zenawi, Perdana Menteri Ethiopia, dalam pidatonya di depan anggota parlemen Ethiopia memberikan peringatan terhadap Mesir dan Eritrea pada 05/04/2011, yang antara lain menyampaikan bahwa Eritrea dan Mesir telah melanjutkan upaya mereka untuk mengacaukan Ethiopia, atas dukungannya terhadap “Mujahideen Youth Movement” (MYM) di Somalia dan kelompok pemberontak Ethiopia seperti “Front for the Liberation of Uganda” (FPLU).

Untungnya, Uganda tetap memilih sikap untuk mendukung hak Mesir. Presiden Uganda, Yoweri Museveni dalam pertemuannya dengan delegasi Mesir pada 06/04/2011 menyampaikan statementnya yang menyinggung bahwa negaranya tidak akan mencederai krisis Mesir dalam hal jatah kuota air sungai Nil. Cara diplomasi perlu digunakan dalam menangani hal tersebut, dan Uganda tidak akan menandatangani konvensi Entebe sebelum berunding dengan negara-negara Nile Basin untuk menghentikan pelaksanaan konvensi itu.

Dalam kerangka konflik Nil, sebelumnya pada 16/03/2011 Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata menugaskan pemerintah untuk menyerahkan rencana program penanaman investasi dan kerjasama dengan Negara-negara Basin Nile dalam berbagai bidang, antara lain pertanian, pengelolaan air, listrik dan transportasi sebagai upaya pemanfaatan sungai Nil bagi penduduk Negara Basin Nile dengan proyek kerjasama.

Dr. Hussein Al Atfi, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi terkait perkembangan isu air sungai Nil pada 10/04/2011 menegaskan, visi futuristik terhadap isu air sungai Nil dibuka pentingnya dialog, komunikasi dan kerjasama dengan Negara-negara Basin Nile dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta keterbukaan kepada

Benua Afrika yang telah dimulai dengan kunjungan PM Dr. Essam Sharaf ke Sudan pasca revolusi.

Upaya strategis lainnya yaitu melalui bidang pendidikan, di mana pada 11/04/2011 di kantor pusat Al Azhar, Mesir, Syeikh Al Azhar Ahmad Tayeb bertemu dengan Menlu Mesir, Nabil Al Arabi, membicarakan berbagai hal terutama peran Al Azhar dalam Negara-negara Basins Nil untuk memperbaiki hubungan yang selama ini merenggang akibat konflik sungai Nil. Dalam pertemuan tersebut Al Arabi meminta agar Al Azhar menambah beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari 9 negara Basins Nil yang sedang belajar di Institusi Al Azhar dengan berbagai disiplin, di samping mendirikan sekolah-sekolah dan Islamic center serta beasiswa di Negara-negara Basins Nil, dan juga mengirim ratusan da'i pada bulan Ramadhan.

Pemerintah Mesir menekankan bahwa Mesir akan menyambut baik segala bentuk solusi dan upaya untuk mengakhiri krisis yang dialami Mesir dengan Ethiopia dan Negara-negara Basins lainnya, sambil berharap agar dapat melakukan negosiasi ulang terhadap "Nile Basins Cooperation Framework Agreement" yang telah disepakati oleh negara-negara Basins Nil kecuali Mesir dan Sudan.

Dalam rangka upaya diplomasi tersebut, pada 29/04/2011, Delegasi Diplomasi Publik Mesir untuk Penyelesaian Konflik Air Sungai Nil yang menyeret 40 tokoh politik Mesir melakukan kunjungan ke Addis Ababa. Dalam kunjungan tersebut ditegaskan bahwa Ethiopia sama sekali tidak akan merugikan kepentingan Mesir. Dan Bendungan "Millenium" yang akan dibangun tidak akan mengurangi kuota jatah Mesir. Dalam konteks ini ditegaskan, pendirian Dam pembangkit tenaga listrik di Ethiopia atau Uganda tidak berimbas negatif terhadap kuota jatah Mesir dan Sudan, karena jumlah kuota air yang datang dari Negara-negara Basins Nil bagian selatan sekitar 16% dan 14% dari Ethiopia melalui Nil Biru dan sebagian besar (70%) berasal dari sungai Atbara sebelah utara kota Khartoum.

Upaya diplomasi Mesir pasca revolusi ini setidaknya telah menunjukkan indikasi positif ke arah peningkatan kerjasama dengan Negara Basins Nil. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan PM Ethiopia, Meles Zenawi pada 16/05/2011 dengan mengadakan pertemuan di Kairo bersama para pejabat tinggi Mesir seperti Jenderal Mohammad Hussein Tantawi dan PM Mesir, Dr. Essam Sharaf untuk membicarakan perihal pemanfaatan air Nil. Hasilnya adalah berbagai kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua Negara, antara lain di bidang Sumber Daya Air dan Pengairan, Kesehatan, Pertanian, serta penambahan beasiswa dan program pelatihan untuk Negara-negara Basins Nil.

Demikianlah upaya diplomasi Mesir dalam salah satu urusan luar negerinya yang hanya mengurus masalah air sungai Nil dengan Negara lain begitu peliknya dan penuh dengan berbagai tantangan dan pengorbanan yang memang harus dilakukan untuk menutup dan menebus segala kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan strategi diplomasi luar negerinya di masa rezim lama. Namun begitu arifnya pemerintahan transisi ini untuk segera melakukan tindakan cepat dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintahannya demi masa depan negaranya. Apabila tidak segera melakukan tindakan cepat, niscaya Mesir akan menjadi bulan-bulanan negara lain manakala kondisi Mesir sedang dalam keadaan lemah dengan permasalahannya di dalam negeri.

Selain permasalahan air sungai Nil, Mesir masih mempunyai permasalahan lain yaitu peran Mesir dalam isu Palestina. Apabila kita telusuri sejarah pemerintahan Mesir sejak penandatanganan perjanjian damai "Camp David" dengan Israel, Mesir tampak tidak menyadari dan cenderung menyalahkan kekuatan lunak (soft power) yang telah dimilikinya. Walau pun



perjanjian itu sendiri tidak mengancam posisi Mesir tersebut dengan berbagai alasan yang secara taktis dapat dimengerti. Namun peran regional dan peran aktif Mesir dalam memperjuangkan isu rakyat Palestina meng- alami kemunduran. Hal ini terlihat dengan absennya Mesir bahkan sikap kerasnya terhadap kehadiran sipil Internasional dalam adegan bantuan kemanusiaan mendukung Gaza. Mesir telah mengambil sikap menunda dalam mengutuk penyerangan Armada Kebebasan (Freedom Flotilla) dan pembunuhan warga sipil. Sikap politik ini sebelumnya juga tercermin dalam menyikapi perang Juli 2006 antara Hizbullah dengan kekuatan Zionis Israel yang termasuk bidang bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.

Pasca “Revolusi 25 Januari” perubahan situasi dalam negeri Mesir berpe- ngaruh secara dastis dalam kebijakan luar negeri Mesir, khususnya terkait dengan isu Palestina dan blockade Gaza. Menlu Mesir, Nabil Al Araby pada 29/04/2011 menegaskan bahwa Mesir segera akan mengambil langkah untuk meringankan blockade Gaza, dan Mesir tidak akan membiarkan perbatasan Rafah (daerah perbatasan dengan Gaza) terblokade, dan kepu- tusan menutup pintu perbatasan dengan Gaza dikatakan sangat memalukan. Di samping itu beliau juga mengkritik kebijakan blockade tersebut atas dasar HAM Internasional. Baginya, Mesir memiliki tanggungjawab moral untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, serta mendorong masyarakat Internasional untuk menekan Israel mencabut blockade. Kemudian kebijak- an ditutupnya perbatasan dengan Gaza akhirnya diubah. Pejabat Palestina dari Hamas diijinkan untuk melakukan perjalanan ke Rafah. Penyeberangan perbatasan juga telah kembali dibuka setelah ditutup selama sebulan sejak peristiwa 25 Januari meskipun masih membatasi 300 orang per hari.

Bagi Mesir, alasan mendukung blockade didasari oleh sentimen anti-Hamas. Mesir tidak ingin dilempari tanggung jawab oleh Israel dan AS atas tindakan-tindakan Hamas, di samping manuver Israel untuk melemparkan isu Gaza ke pangkuan Mesir. Di sisi lain, peran mediasi Mesir sukses mendamaikan Hamas dan Fatah hingga mereka sepakat untuk menghilang- kan semua perbedaan dan perselisihan yang ada sejak berkuasanya Hamas di Gaza pada 2007. Pihak Intelijen Mesir yang memediasi rekonsiliasi ini menyatakan bahwa dialog sudah mencapai titik kesepahaman termasuk di dalamnya mengenai penentuan jadwal pemilu.

Para pengamat dan peneliti dari Al Ahram Center for Politic and Strategic Studies (ACPSS) salah satunya berpendapat bahwa kebijakan politik Mesir ini benar-benar merupakan sebuah kebijakan yang independen dari pihak Kemenlu Mesir. Dan Menilai bahwa rezim Mubarak dulunya selalu mengekor pada kebijakan AS dan Israel mengenai Palestina. Demikian pula tanggapan dari pihak IM dalam kasus Palestina, bahwa pemerintah yang akan datang agar dapat mengkaji ulang Perjanjian Camp David dengan Israel. Dalam opini mingguannya di media Mesir, Ketua IM, Dr.Mohammad Badie mengatakan bahwa tahapan berikutnya masyarakat Mesir perlu bersatu dan bersikap tegas dan mengkaji ulang perjanjian Camp David. Kemudian menyeru pemerintah untuk memutus suplay gas alam ke zona industri Israel. Dalam hubungannya dengan blockade Gaza, IM akan mene- ruskan perjuangannya menekan pemerintah untuk membuka perbatasan rafah yang menghubungkan dengan wilayah Gaza dalam upaya untuk meng- akhiri isu pengamanan perbatasan.

Penuturan-penuturan di atas, dari mulai isu sosial politik dalam negeri Mesir, isu kuota air sungai Nil sampai kepada isu blockade Gaza, jelas-jelas sarat dengan unsur diplomasi yang sangat berperan dalam membangun karakter bangsa untuk tidak saling bermusuhan. Diplomasi digunakan bukan untuk melumpuhkan lawan, melainkan memberikan manfaat kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan tertentu maupun mempunyai kepentingan yang sama dan untuk kemaslahatan semua pihak, serta saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam kasus Mesir dapat kita lihat cerminan permasalahan yang sebenarnya semuanya dapat segera diatasi dengan diplomasi, bukan dengan menyalah- gunakan diplomasi yang akhirnya diplomasi menjadi hilang maknanya dan berubah menjadi taktik dan tipu daya, bahkan dalam sedikit guyonan politik dapat kita katakan menjadi hilang auranya, karena sudah tidak lagi mewakili bangsa dan negaranya, melainkan sudah dipolitisir mewakili pribadinya. Dan penyebabnya adalah bahwa seseorang yang semakin memiliki kedudukan yang tinggi biasanya sifat arogansinya akan muncul dan lupa tentang jati dirinya, seolah-olah yang dia kerjakan merupakan hasil kerja pribadinya, padahal yang dia kerjakan merupakan amanat hati nurani rakyatnya.

## **Penutup**

Kita baru saja melihat carut marutnya kepemimpinan suatu negara, di mana pemimpinnya lupa menggunakan diplomasi sebagai tongkat penyelamat jalannya negara ke arah tujuan yang lebih baik, melainkan terperosok ke jurang yang dalam, sehingga untuk menapakinya lagi ke atas daratan keselamatan memerlukan energi ekstra dan menciptakan tongkat yang lebih kuat lagi untuk meniti kembali menuju kehidupan ke daratan yang lebih menjanjikan. Begitulah anekdot tongkat sebagai perumpamaan bagaimana seharusnya kita menggunakan diplomasi. Di sini kita mendapat suatu pelajaran berharga dari apa yang namanya diplomasi. Maka dari itu, sebelum kita menggunakan diplomasi sebaiknya kita mengenal jati diri kita terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengenal lingkungan di sekitar kita, memelihara asset yang kita miliki, menata dan menjaga ketiganya tersebut, kemudian memanfaatkannya semaksimal mungkin agar diplomasi dapat mengantarkan dan mewujudkan suatu kedamaian dan keadilan.

Mari kita sedikit melihat sebuah teori tentang diplomasi yang ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Soeharto, yaitu Menlu Ali Alatas yang sangat terkenal di dunia internasional dan juga sangat disegani dan dikagumi oleh kalangan diplomat dunia. Persoalannya bukan karena beliau orang pandai, tapi beliau pandai mengemas sesuatu yang diamanatkan kepadanya oleh Presiden RI kala itu. Bagaimana pun berat tugas itu, tapi beliau dapat mengemban tugas tersebut dengan melakukan berbagai strategi yang dikehendaki oleh pemimpin Negara. Beliau tidak pernah memanfaatkan amanat ini untuk kepentingan pribadi, sehingga dalam segala macam event apa pun tidak pernah muncul kata-kata Ali Alatas Statement, yang ada adalah Indonesian Government Statement.

Beberapa catatan pengalaman yang beliau torehkan dalam tulisannya yang merupakan beberapa pengalaman di dunia diplomatiknya selalu mengesankan para pembacanya, disertai dengan bahasa yang santun dan begitu sangat bermaknanya ulasan-ulasan beliau, sehingga apa-apa yang menjadi sepek terjangnya di dunia diplomatic sangat perlu diteladani oleh diplomat mana pun, terlebih oleh para diplomat kita saat ini di mana banyak hal yang sangat perlu diperbaiki dalam rangka hubungan diplomatic dengan Negara lain, utamanya dengan tetangga dekat kita saat ini yaitu Malaysia yang persoalannya selalu semakin bertambah, namun upaya penyelesaiannya selalu berbelit-belit seolah-olah tidak ada satu menteri pun yang dapat mengatasinya sehingga presiden terpaksa turun tangan. Maka di sinilah diperlukan seorang diplomat yang andal dalam mengatasi permasalahan di bidangnya.

Salah satu cuplikan dari kumpulan pidatonya yang berjudul “A Voice for a Just Peace” (2001), dalam pengantarnya dikatakan:

For the business of the diplomat is peace. Peace in the immediate neighbourhood and in the global neighbourhood. He may have been told by his superiors or those who trained him for the job that his mission is to promote and defend the national interest. But in the final analysis

the highest national interest is peace. When a diplomat is negotiating a political settlement, promoting trade and investment, arguing for transfer of technology, proposing cultural exchange, or even just attending a diplomatic reception, he is chipping into shape one little brick for the edifice of peace. That little brick may be all that he gets his hands on throughout his career, but if he is dedicated to his vocation and has imagination, he may be privileged with a personal vision of the grand edifice of peace that is the object of his toils.

Secara umum terjemahannya sebagai berikut:

Bahwa bisnis diplomat adalah perdamaian. Perdamaian dengan negara-negara tetangga dan di lingkungan global. Dia mungkin telah dipekerjakan oleh pimpinannya atau orang-orang yang melatihnya bahwa misinya adalah untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional, tetapi pada analisis akhir, kepentingan nasional yang tertinggi adalah perdamaian. Ketika seorang diplomat menegosiasikan penyelesaian politik, mempromosikan perdagangan dan investasi, berargumentasi untuk transfer teknologi, mengajukan pertukaran budaya, atau bahkan hanya menghadiri resepsi diplomatik, dia sedang berusaha membuat batu bata kecil untuk bangunan perdamaian. Mungkin hanya batu bata kecil itu yang bisa dia dapatkan selama karirnya, tetapi jika berdedikasi terhadap pekerjaannya dan memiliki imajinasi, dia mungkin diistimewakan dengan visi personal dari bangunan perdamaian yang menjadi obyek kerja kerasnya.

Demikian dalam makna kata-kata dan kalimat beliau dalam ulasan kata pengantarnya ini, yang mencerminkan betapa pentingnya seorang diplomat dalam mengangkat kepentingan nasionalnya, walaupun baru sedikit yang didapat di dalam pergaulan diplomatiknya, namun dengan dedikasi dan kerja kerasnya dapat menciptakan suatu petunjuk penting bagi perdamaian dan kepentingan nasional sebagaimana yang diamanatkan dan diharapkan oleh pimpinan negaranya.

Demikianlah sekelumit tentang diplomasi, di mana diplomasi juga memerlukan landasan strategis yaitu dengan menggunakan cara membuka kunci-kunci perangkat lunak yang kita miliki dan bernilai strategis, kemudian memeliharanya dengan baik dan dilakukan secara terus menerus sebagai modal utama bagi kepentingan nasional dan internasional untuk masa kini dan masa depan kehidupan bangsa.\*\*\*

## **Bibliografi**

- Diamond, Louise & John W. McDonald. 1996. *Multi-Track diplomacy: A System Approach to Peace* Third Edition. New York: Kumarian Press.
- Ding, Sheng. 2014. *Chinese Soft Power and Public Diplomacy: An Analysis of China's New Diaspora Engagement Policies in the Xi Era*. The East Asia Institute.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rachmawati, Iva. 2016. *Diplomasi Publik*. Yogyakarta: Cakpulis
- Roy, S.L.. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Sayama, Osamu. 2016. *China's Approach to Soft Power Seeking a Balance between Nationalism, Legitimacy and International Influence*. Royal United Services Institute
- Shoelhi, Mohammad. 2015. *Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Suryakusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM.